

DINAMIKA KESEJAHTERAAN PETANI DAN NONPETANI DI INDONESIA: *Suatu Analisis Makro vs Mikro*

The Dynamics of Farmer's and Farmer's Welfare in Indonesia: A Macro VS Micro Analysis

Nyak Ilham

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The success development of a country is shown by the improvement of community's welfare from time to time. The objective of this study is to analyze the dynamics of farmer's and non farmer's welfare during the period of 2002-2005 using macro and micro approaches. Data used in this study is secondary data published by BPS. The analysis applied is quantitative descriptive method using tabulation, graph, and figure techniques. The results reveal that (1) the results using macro welfare indicators is not in line with those of micro indicators; (2) non farmers household relatively more prosperous than farmers household, both in urban and rural areas and at groups of the same level of income; (3) non farmers household, both in urban and rural areas and at groups of various level of income, is more sensitive on economic shock compared to that of farmers household. Policy implication drawn from such information is that the use of macro welfare indicators is not sufficient, higher value and certain quality are required; and to have a more detail analysis, the share of food expenditure - which is a micro indicator - is necessary.

Key words: *welfare, indicator, micro, macro*

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditunjukkan oleh makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis dinamika kesejahteraan masyarakat pertanian dan nonpertanian dalam kurun waktu 2002-2005 menggunakan pendekatan makro dan mikro. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik tabulasi, grafik dan gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) penggunaan indikator kesejahteraan makro hasilnya tidak sejalan dengan penggunaan indikator kesejahteraan mikro; (2) rumah tangga nonpertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga pertanian baik di desa maupun di kota, serta pada kelompok dengan kelas pendapatan yang sama; dan (3) rumah tangga nonpertanian baik di kota maupun di desa serta pada berbagai kelas pendapatan lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan rumah tangga pertanian. Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah: penggunaan indikator makro kesejahteraan masih belum cukup, diperlukan besaran dan kualitas tertentu, dan untuk melihat lebih rinci diperlukan indikator mikro berupa pangsa pengeluaran pangan.

Kata Kunci : *kesejahteraan, indikator, mikro, makro*

PENDAHULUAN

Indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah yang banyak digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut sebaiknya berkedudukan sejajar dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya (Riasa *et al.*, 2002). Dalam prakteknya, selain bergerak dalam sektor produksi barang dan jasa, pemerintah lebih banyak berperan dalam sektor regulasi dan fasilitasi, termasuk mengendalikan dan mengantisipasi pengaruh eksternal yang bersifat negatif. Besaran dan arah peran pemerintah tersebut sangat menentukan peran dunia usaha dan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang pada akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah menggunakan pertumbuhan PDB sebagai indikator kesejahteraan sifatnya masih sangat makro. Menurut Siregar (2007), masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Karena itu, penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup. Untuk mempertajam analisis, tingkat pertumbuhan ekonomi perlu dipilah lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha, jenis pengeluaran, dan wilayah. Disamping itu, pada tingkat yang lebih mikro dengan menggunakan kaidah hukum Engle, tingkat kesejahteraan dapat dilihat hingga ke tingkat rumah tangga.

Studi ini bertujuan: (1) menganalisis dinamika tingkat kesejahteraan secara makro dengan menggunakan PDB baik pada tingkat nasional, regional, lapangan usaha, dan jenis pengeluaran; (2) menganalisis dinamika tingkat kesejahteraan secara mikro hingga ke tingkat rumah tangga berdasarkan pangsa pengeluaran pangan pada kelompok petani dan nonpetani menurut wilayah dan kelas pendapatan; dan (3) memberikan rekomendasi arah kebijakan pemerintah agar pembangunan yang dilakukan hasilnya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

PDB sebagai Indikasi Kesejahteraan

Nilai PDB menggambarkan aktivitas produksi dari suatu negara. Perhitungan PDB dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu sisi penawaran berdasarkan lapangan usaha menurut sektor dan sisi permintaan atau

penggunaan, yaitu untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Hal itu berarti, jika terjadi pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan berproduksi mengalami peningkatan, perkembangan, dan penggunaan teknologi mengalami peningkatan, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pertumbuhan PDB dengan angka pengangguran dikenal sebagai Hukum Okun, yaitu setiap peningkatan satu persen pengangguran akan menurunkan PDB 2,5 persen (Lipsey *et al.*, 1992). Dengan demikian, jika PDB meningkat seharusnya pengangguran menurun. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun kesejahteraan masyarakat secara umum tidak meningkat, berarti ada ketidakseimbangan, baik antarsektor maupun antarwilayah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, selain pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga indikator yang lebih mikro untuk melihat dinamika kesejahteraan masyarakat.

Pangsa Pengeluaran Pangan sebagai Indikasi Kesejahteraan

Secara mikro, tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat didekati dengan Hukum Engel. Menurut Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan (Deaton dan Muellbauer, 1980). Dalam keadaan harga barang dan selera masyarakat tetap maka peningkatan pendapatan menunjukkan peningkatan kesejahteraan karena jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin meningkat (Varian, 1992).

Dengan perkataan lain, menurunnya pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga akan meningkatkan ketahanan pangan dan juga sebagai indikasi peningkatan kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dalam teori kesejahteraan, jika kesejahteraan rumah tangga meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Menurut Ilham dan Sinaga (2007), pangsa pengeluaran mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan, dan pendapatan regional. Makin rendah pangsa pengeluaran pangan rumah tangga maka makin tinggi dan beraneka ragam pangan yang dikonsumsi. Perilaku demikian secara umum hanya dapat dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau masyarakat yang makin meningkat kesejahteraannya.

Cakupan

Dari sisi makro cakupan studi ini bersifat nasional. Disagregasi untuk membedakan pertanian dan nonpertanian digunakan proksi PDB berdasarkan sektor atau lapangan usaha yaitu pertanian dan nonpertanian. Disagregasi

berdasarkan wilayah digunakan untuk mempertajam analisis apakah ada senjang antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Dari sisi mikro cakupan studi juga bersifat nasional. Namun, penajaman analisis untuk melihat apakah perilaku yang terjadi sama antara tingkat nasional dan tingkat provinsi, diambil contoh tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Analisis yang lebih tajam dilakukan dengan cara mendisagregasi menjadi petani dan nonpetani pada wilayah desa kota dan kelas pendapatan.

Dinamika kesejahteraan yang ingin dilihat terkait dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan termasuk adanya kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005 (Tabel 1) dan kenaikan harga beras selama periode 2002-2005 (Tabel 2). Dua guncangan ekonomi tersebut dianggap penting karena kedua produk tersebut sangat menentukan inflasi di Indonesia (CSIS, 2002; Gunawan, 1991; Amang, 1984). Kenaikan inflasi dengan pendapatan tetap menyebabkan daya beli menjadi turun sehingga kesejahteraan menurun.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2005, kenaikan harga BBM pertama terjadi pada tanggal 1 Maret. Sementara itu BPS melakukan survei Susenas pada Bulan Februari – Maret. Dengan demikian, dampak kenaikan harga BBM bisa terjadi pada tahun 2005 ataupun pada tahun 2006, terutama dampak kenaikan harga BBM untuk kedua kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2005.

Tabel 1. Kenaikan Harga Eceran BBM di SPBU Indonesia, Tahun 2005 (Rp/liter)

Tanggal	Pertamax	Premium	Minyak Tanah	Minyak Solar
3 Januari	4.000	1.810	1.800	1.650
1 Maret	4.000	2.400	2.200	2.100
1 September	5.700	2.400	2.200	2.100
1 Oktober	5.700	4.500	2.000	4.300
21 Nopember	5.400	4.500	2.000	4.300
1 Desember	5.400	4.500	2.000	4.300

Sumber: Pertamina

Untuk guncangan harga beras, Tabel 2 tidak menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Hal itu disebabkan data harga tersebut merupakan rata-rata dari berbagai lokasi di Indonesia. Pada kenyataannya pada wilayah tertentu kenaikan harga pada Februari tahun 2002 memberikan pengaruh yang berarti. Hal yang sama pasti terjadi pada kenaikan harga pada Februari 2003 dan Desember 2004-2006.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari data Susenas tahun 2002 dan 2005, data PDB dan PDRB, data keadaan angkatan kerja, dan jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 2. Perkembangan harga Eceran Beras Medium di Indonesia, Tahun 2002-2005 (Rp/kg)

Bulan	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	2.963	2.848	2.818	3.095	3.879
Februari	3.057	2.870	2.847	3.130	4.233
Maret	2.906	2.868	2.831	3.164	4.194
April	2.853	2.802	2.825	3.119	4.020
Mei	2.862	2.757	2.829	3.088	4.013
Juni	2.820	2.753	2.809	3.070	4.131
Juli	2.763	2.701	2.750	3.138	4.172
Agustus	2.691	2.712	2.848	3.180	4.233
September	2.665	2.781	2.875	3.231	4.225
Oktober	2.729	2.785	2.892	3.417	4.238
Nopember	2.796	2.775	2.913	3.510	4.273
Desember	2.807	2.778	2.972	3.581	4.490
Rataan	2.826	2.786	2.851	3.227	4.160

Sumber: Bulog

Analisis Data

Data yang digunakan dianalisis dengan statistik deskriptik dengan menggunakan teknik tabulasi silang, grafik dan gambar. Dua peubah dependen kunci dalam studi ini adalah PDB dan pangsa pengeluaran pangan.

Untuk menghindari pengaruh inflasi, maka PDB yang digunakan merupakan PDB harga konstan menggunakan tahun dasar 2000. Untuk mempertajam analisis digunakan juga peubah PDB per kapita dengan formula sebagai berikut:

$$PDBK_t = PDB_t / POP_t \quad (1)$$

dimana:

$PDBK_t$ = PDB per kapita tahun t

PDB_t = PDB harga konstan tahun t

POP_t = Populasi penduduk tahun t

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga yang digunakan dalam studi ini adalah rasio pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan dan pengeluaran total rumah tangga selama sebulan. Perhitungan pangsa pengeluaran pangan (PF) menggunakan formula berikut:

$$PF_t = \frac{PP_t}{TP_t} * 100\% \quad (2)$$

dimana:

PF_t = Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga tahun t (%)

PP_t = Pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan tahun t (Rp/bulan)

TP_t = Total pengeluaran rumah tangga tahun t (Rp/bulan)

PERTUMBUHAN PDB SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN

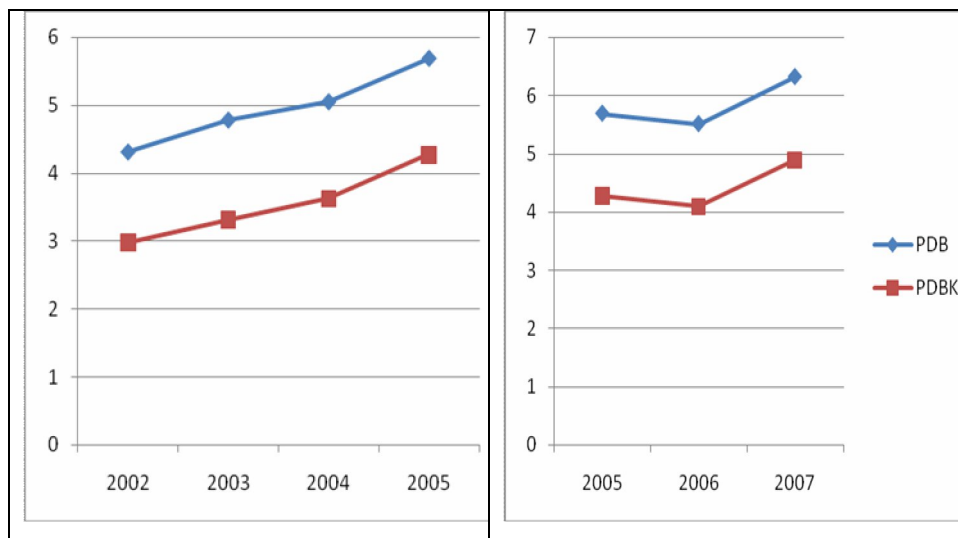
Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita

Sebagai indikator kesejahteraan makro, PDB dan PDB per kapita Indonesia pada periode 2002–2005 mengalami pertumbuhan masing-masing 4,96 dan 3,55 persen per tahun (Tabel 3 dan Gambar 1). Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagai suatu negara, baik pada periode 2002-2005 maupun 2005-2007, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan.

Tabel 3. Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita Indonesia, Periode 2002-2005 dan 2005-2007

Tahun	PDB (%)	PDBK (%)
2002	4,31	2,98
2003	4,78	3,31
2004	5,05	3,62
2005	5,69	4,27
2006	5,51	4,09
2007	6,32	4,89
Rataan		
2002-2005	4,96	3,55
2005-2007	5,84	4,42

Sumber: BPS (berbagai terbitan, diolah)



Gambar 1. Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita Indonesia, Periode 2002-2005 dan 2005-2007

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak dunia usaha dan masyarakat secara makro mampu menekan dampak kenaikan harga beras dan harga BBM yang terjadi pada periode tersebut. Walaupun ada dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan PDB pada tahun 2006, namun dampaknya tidak berlanjut hingga ke tahun 2007. Dimana pada tahun 2007 PDB tumbuh melampaui pertumbuhan pada tahun 2005.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan PDB per kapita mempunyai arah yang sama. Dua indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meningkat kesejahteraannya. Namun demikian, karena sifatnya yang sangat agregat, indikator pertumbuhan PDB dan PDB per kapita masih dianggap belum cukup. Perlu dilihat apakah pertumbuhan dua indikator tersebut sudah mampu menurunkan jumlah pengangguran yang dapat juga digunakan sebagai proksi kesejahteraan.

Ternyata pertumbuhan PDB hingga 4,96 persen pada periode 2002-2005 belum mampu menurunkan jumlah pengangguran yang terus meningkat sebesar 10,5 persen per tahun pada periode yang sama (Tabel 4). Ketika PDB tumbuh 5,84 persen per tahun pada periode 2005-2007, jumlah pengangguran sudah mulai berkurang sebesar 0,4 persen setiap tahun.

Dengan demikian besarnya angka pertumbuhan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi secara makro sudah mampu meningkatkan kesejahteraan yang diproksi dari makin menurun jumlah penduduk miskin. Selain besarnya, faktor lain yang menentukan kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas dari pertumbuhan PDB tersebut. Apakah pertumbuhan PDB yang terjadi hanya dinikmati kelompok tertentu sehingga sebarannya tidak merata. Untuk itu perlu dipilah lebih lanjut pangsa PDB dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, jenis pengeluaran, dan distribusinya pada wilayah Indonesia.

Tabel 4. Hubungan Pertumbuhan PDB dan Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia, Tahun 2002-2007

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Pengangguran Terbuka (juta jiwa)
2002	4,31	9,1
2003	4,78	9,8
2004	5,05	10,3
2005	5,69	11,9
2006	5,51	10,9
2007	6,32	10,0
Rataan 02-05	4,96	10,3
R (%/thn) 02-05	-	10,5
Rataan 05-07	5,84	10,9
R (%/thn) 05-07	-	-0,4

Sumber: BPS (berbagai terbitan)

PDB Sektor Pertanian dan Nonpertanian

Pemilahan PDB berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa pangsa PDB pertanian jauh lebih kecil dan menurun terus dari 15,39 persen pada tahun 2002 menjadi 13,83 persen tahun 2007. Hal sebaliknya terjadi pada PDB nonpertanian, yaitu 84,61 persen tahun 2002 menjadi 86,17 persen pada tahun 2007 (Tabel 5). Di sisi lain, sektor pertanian menerima beban untuk menyerap angkatan kerja relatif lebih besar dibandingkan sektor nonpertanian.

Tabel 5. Pangsa PDB dan Angkatan Kerja Pertanian dan Nonpertanian di Indonesia, 2002-2007 (%)

Tahun	PDB Pertanian	PDB Nonpertanian	Angkatan Kerja Pertanian	Angkatan Kerja Nonpertanian
2002	15,39	84,61	44,34	55,66
2003	15,24	84,76	46,26	53,74
2004	14,98	85,02	43,33	56,67
2005	14,54	85,46	43,97	56,03
2006	14,15	85,85	42,05	57,95
2007	13,83	86,17	41,24	58,76

Sumber: BPS (berbagai terbitan, diolah)

Konsekuensinya produktivitas sektor pertanian lebih rendah dari sektor nonpertanian, sehingga pertumbuhan PDB sektor pertanian juga relatif lebih rendah dari sektor nonpertanian (Tabel 6). Aktivitas sektor pertanian umumnya berada di wilayah perdesaan, dengan demikian menjadi wajar jika jumlah penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Menurut BPS (2008) rataan jumlah penduduk miskin selama tahun 2002-2005 di perdesaan mencapai 24,3 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 14, 5 juta jiwa per tahun.

Tabel 6. Pertumbuhan PDB Pertanian dan Sektor Nonpertanian di Indonesia, Tahun 2002-2007 (%)

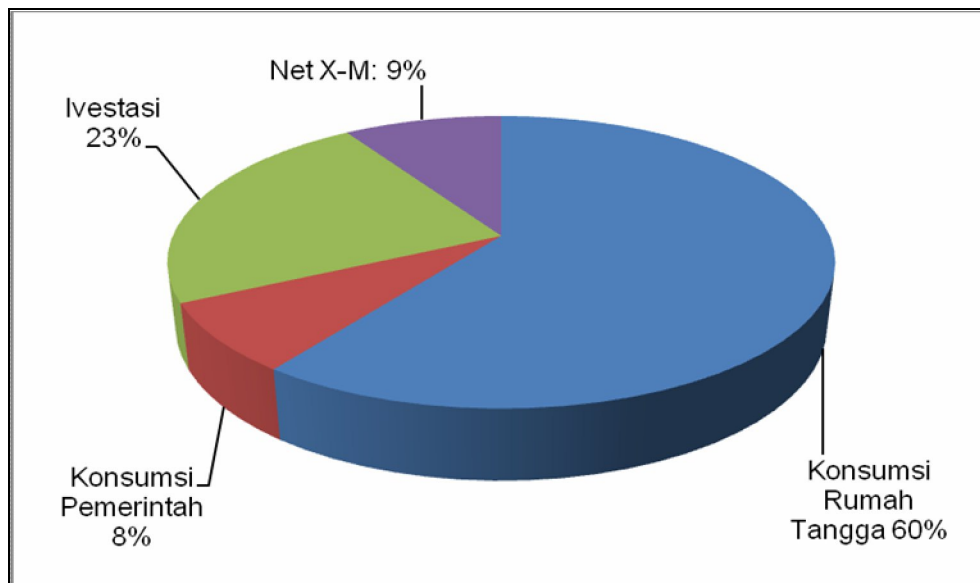
Tahun	Per-tanian	T&G	Industri	LGA	Ba-ngunan	PHR	A&K	KP&JP	Jasa
2002	2,63	1,00	5,29	8,94	5,48	3,84	8,39	6,85	3,75
2003	3,79	-1,37	5,33	4,87	6,10	5,45	12,19	6,73	4,41
2004	3,26	-4,48	6,38	5,22	7,49	5,69	13,38	7,70	4,85
2005	2,72	3,20	4,60	6,30	7,54	8,30	12,76	6,70	5,16
2006	3,36	1,70	4,59	5,76	8,34	6,42	14,38	5,47	6,16
2007	3,50	1,98	4,66	10,40	8,61	8,46	14,38	7,99	6,60

Sumber: BPS (berbagai terbitan)

Pemilahan PDB menurut sektor menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara pangsa PDB dengan pangsa serapan tenaga kerja antarsektor. Hal ini hendaknya mendapat perhatian bahwa pembangunan di perdesaan, baik sektor pertanian maupun sektor pendukungnya perlu lebih ditingkatkan. Upaya tersebut selain mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan juga sekaligus memecahkan masalah penyediaan pangan dan urbanisasi.

PDB Berdasarkan Pengeluaran

Komponen PDB berdasarkan pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Selama lima tahun terakhir komposisinya juga masih sangat timpang. Konsumsi rumah tangga mendominasi hingga 60 persen, sedangkan investasi 23 persen, net ekspor-impor sembilan persen, dan konsumsi pemerintah delapan persen (Gambar 2).



Gambar 2. Rataan Distribusi PDB Nasional menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2002-2005

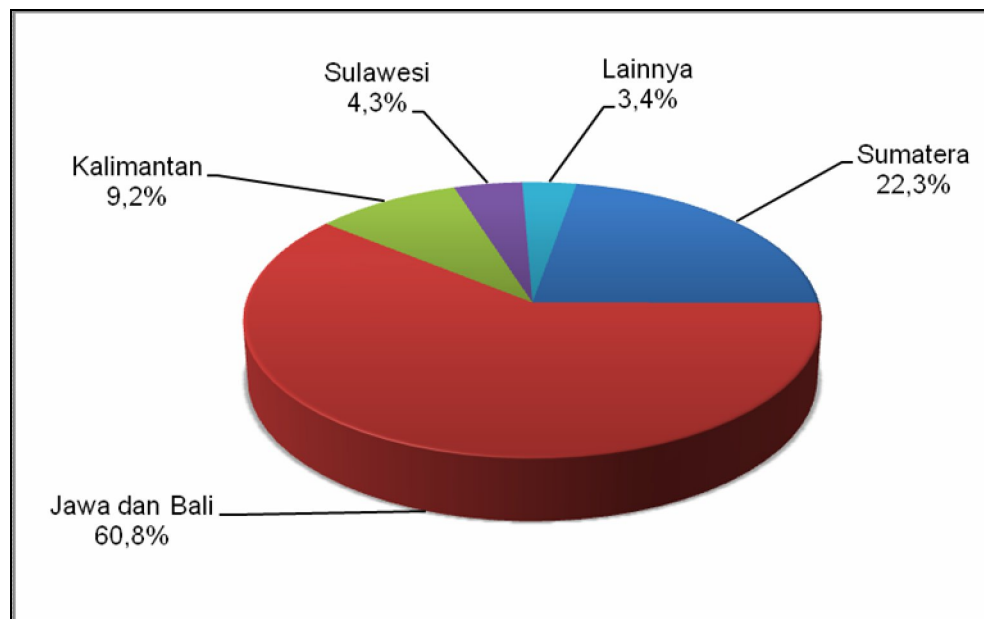
Besaran pangsa dan pertumbuhan masing-masing komponen dapat dijadikan alasan kenapa besaran tingkat pertumbuhan yang terjadi masih belum mampu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Pangsa konsumsi rumah tangga tidak banyak berarti dalam penyerapan tenaga kerja jika tidak diikuti pangsa investasi yang besar. Ini berarti barang konsumsi banyak berasal dari sektor informal atau sektor formal yang jumlahnya tidak bertambah. Kondisi ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga banyak angkatan kerja berpindah ke sektor pertanian dan menyebabkan naiknya jumlah pengangguran di perkotaan.

Pertumbuhan PDB 4,96 persen dengan pangsa pengeluaran konsumsi 60 persen, sementara angka pengangguran tumbuh 10,5 persen maka dapat ditafsirkan bahwa penduduk berpendapatan tinggi hidup mewah dengan pola konsumtif, sedangkan kelompok pendapatan rendah hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar semata. Fakta ini makin memperkuat bahwa pertumbuhan PDB masih belum berkualitas.

PDB menurut Wilayah

Sebaran PDB menurut wilayah juga masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan (Gambar 3). Aktivitas ekonomi terpusat di Jawa dan Bali dengan pangsa PDB mencapai 60,8 persen. Kondisi ini menyebabkan tarikan migrasi ke kota-kota besar di Jawa dan Bali dari pulau-pulau lain. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak sosial dan politik yang negatif. Karena sebagian sumber daya dipergunakan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dan penduduk di Jawa dan Bali.

Selain pangasanya yang besar, pada periode yang sama data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB di Jawa dan Bali juga relatif besar (5,1%) dibandingkan wilayah lain (3,0% – 4,1%), kecuali Sulawesi (5,4). Pertumbuhan PDB Sulawesi yang melampaui Jawa dan Bali mengindikasikan bahwa jika alokasi sumber daya lebih disebar merata maka kemampuan luar Jawa untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat. Dengan demikian kesejahteraan akan makin menyebar dan tidak hanya dinikmati penduduk sektor nonpertanian, penduduk kota, dan penduduk pulau Jawa dan Bali.



Sumber: BPS (berbagai terbitan)

Gambar 3. Rataan Distribusi PDB menurut Wilayah di Indonesia, 2002-2005

PANGSA PENGELUARAN PANGAN SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Pangsa Pengeluaran Pangan menurut Wilayah

Secara agregat nasional pangsa pengeluaran rumah tangga berdasarkan mata pencaharian dan wilayah desa-kota mengalami peningkatan (Tabel 7). Hal yang sama secara konsisten terjadi juga pada tiga provinsi lokasi penelitian. Berdasarkan Hukum Engle, fakta ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan.

Tabel 7. Sebaran Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah tangga menurut Wilayah, Tahun 2002-2005 (%)

Uraian	Sumsel			Jabar			Jateng			Indonesia		
	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan
Pertanian												
Kota	67,5	78,3	16,0	63,2	68,4	8,2	63,3	76,7	21,2	64,4	72,9	13,2
Desa	71,9	84,3	17,2	65,9	76,7	16,4	65,3	77,4	18,5	69,2	81,1	17,2
Kota+Desa	71,6	83,8	17,0	65,4	74,9	14,5	64,9	77,3	19,1	68,6	80,1	16,8
Nonpertanian												
Kota	57,6	69,4	20,5	55,8	65,0	16,5	56,8	69,6	22,5	54,4	66,0	21,3
Desa	65,5	79,4	21,2	64,5	75,5	17,1	62,7	75,0	19,6	64,3	76,5	20,0
Kota+Desa	59,5	72,4	21,7	58,9	69,3	17,7	59,3	72,1	21,6	57,7	70,3	21,8

Sumber: SUSENAS 2002 dan 2005 (diolah)

Jika dikomparasi antara rumah tangga berdasarkan mata pencaharian petani dan nonpetani, rumah tangga nonpertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga petani. Hasil ini sejalan dengan analisis makro, dimana PDB sektor nonpertanian baik pangsa maupun pertumbuhan lebih besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Namun demikian, rumah tangga nonpertanian lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan harga beras yang menyebabkan penurunan kesejahteraan. Sensitivitas tersebut dapat dilihat besarnya persentase perubahan kenaikan pangsa pengeluaran pangan antara tahun 2002 – 2005.

Sensitifnya dampak tersebut pada rumah tangga nonpertanian diantaranya disebabkan oleh masih relatif besarnya pangsa pengeluaran pangan penduduk Indonesia, termasuk rumah tangga yang berusaha di nonpertanian. Karena kenaikan harga-harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM mendorong rumah tangga mengutamakan konsumsi pangan dibandingkan konsumsi non pangan, seperti jasa dan barang mewah.

Pemilahan lebih rinci berdasarkan rumah tangga di kota dan desa, Tabel 7 menunjukkan bahwa rumah tangga kota relatif sejahtera dibandingkan rumah tangga desa baik pada kelompok pertanian maupun nonpertanian. Namun sensitivitasnya terhadap kenaikan harga BBM dan harga beras tidak menunjukkan

keunikan. Secara agregat rumah tangga nonpertanian lebih sensitif dibandingkan rumah tangga pertanian. Namun pada tiga provinsi lokasi penelitian bervariasi.

Pangsa Pengeluaran Pangan menurut Kelas Pendapatan

Secara nasional pangsa pengeluaran rumah tangga pada berbagai kelas pendapatan dalam periode 2002-2005 mengalami peningkatan (Tabel 8). Hal yang sama secara konsisten terjadi juga pada tiga provinsi lokasi penelitian. Ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, sedang dan tinggi di Indonesia secara umum mengalami penurunan.

Jika dipilah berdasarkan rumah tangga pertanian dan nonpertanian, pada kelas pendapatan yang sama, rumah tangga nonpertanian lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga pertanian. Hasil ini sejalan dengan pendekatan makro, karena penduduk yang bekerja pada sektor nonpertanian umumnya tinggal di kota dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan beragam

Tabel 8. Sebaran Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga menurut Kelas Pendapatan, 2002-2005 (%)

Uraian	Sumsel			Jabar			Jateng			Indonesia		
	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)
Pertanian												
Rendah	73,3	83,1	13,4	67,4	77,5	15,0	67,5	78,9	16,9	69,7	81,8	17,4
Sedang	71,1	84,5	18,8	64,5	74,1	14,9	64,4	77,1	19,7	68,1	79,5	16,7
Tinggi	66,0	83,7	26,8	56,0	64,7	15,5	53,7	68,2	27,0	65,3	72,8	11,5
Nonpertanian												
Rendah	66,5	72,0	8,3	63,8	75,2	17,9	65,7	77,8	18,4	63,1	76,4	21,1
Sedang	63,2	73,4	16,1	59,8	69,7	16,6	60,9	74,0	21,5	58,5	71,9	22,9
Tinggi	50,0	71,3	42,6	50,5	59,6	18,0	49,0	62,2	26,9	49,6	60,6	22,2

Sumber: SUSENAS 2002 dan 2005, diolah

Sensitivitas rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi bervariasi. Secara agregat nasional respon dampak kenaikan harga beras dan harga BBM terhadap pangsa pengeluaran rumah tangga menurut kelas pendapatan baik pada rumah tangga pertanian dan nonpertanian tidak menunjukkan keunikan. Perilaku yang sama terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa makin tinggi kelas pendapatan makin sensitif terhadap guncangan ekonomi.

Perbedaan perilaku tersebut dapat ditafsirkan bahwa, pada daerah seperti Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga ibukota DKI Jakarta, tingkat pendidikan relatif tinggi. Dengan demikian, selain akses ekonomi yang baik akses fisik terhadap pangan dan informasi tentang gizi juga relatif baik. Sehingga guncangan harga BBM dan harga pangan terhadap kelompok kelas pendapatan

sedang, tidak terlalu berpengaruh karena penyesuaian dan antisipasi terhadap guncangan ekonomi sudah relatif baik.

Pada tahun 2002 terlihat adanya hubungan yang jelas antara kelas pendapatan dengan pangsa pengeluaran pangan. Makin tinggi pendapatan makin rendah pangsa pengeluaran pangan. Namun setelah ada guncangan ekonomi pada tahun 2005, khusus di Provinsi Sumatera Selatan terjadi anomali. Pada kelas pendapatan menengah pangsa pengeluaran pangannya meningkat lebih tinggi dari kelas pendapatan rendah baik pada rumah tangga pertanian dan nonpertanian.

Anomali tersebut secara teori memungkinkan terjadi. Jika asumsi yang digunakan berubah, misal kurva indeferen tidak cembung ke titik nol dan kesejahteraan tidak sejalan dengan kurva indefeen yang makin ke kanan maka Kaidah Engel menjadi tidak relevan lagi. Pada tataran data primer, hasil penelitian Ilham *et al.* (2008) menunjukkan ada kasus bahwa pada rumah tangga pendapatan rendah pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dari rumah tangga berpendapatan lebih tinggi. Ternyata pola konsumsi rumah tangga tidak hanya dipengaruhi pendapatan tetapi faktor budaya juga menentukan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penggunaan pertumbuhan PDB sebagai indikator kesejahteraan makro hasilnya tidak sejalan dengan penggunaan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator mikro untuk melihat tingkat kesejahteraan. Secara makro, pangsa PDB pertanian yang relatif kecil masih menanggung beban menyerap angkatan kerja dalam pangsa yang relatif besar sehingga produktivitasnya menjadi rendah. Secara mikro kondisi ini terlihat secara konsisten bahwa rumah tangga nonpertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga pertanian baik di desa maupun di kota, serta pada kelompok dengan kelas pendapatan yang sama.

Rumah tangga nonpertanian baik di kota maupun di desa serta pada berbagai kelas pendapatan lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan rumah tangga pertanian. Selain memiliki akses ekonomi, akses fisik, dan akses informasi terhadap pangan, faktor budaya juga menentukan perilaku konsumsi yang mempengaruhi sensitivitas rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.

Pemerataan pembangunan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di berbagai lapisan, tetapi dapat juga mengurangi permasalahan sosial dan politik akibat meningkatnya migrasi ke kota besar di Jawa dan Bali, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan untuk meningkatkan pendapat penduduk perdesaan.

Implikasi Kebijakan

Penggunaan PDB sebagai indikator kesejahteraan masih belum cukup. Diperlukan besaran dan kualitas tertentu sehingga perannya dapat menurunkan

angka pengangguran. Untuk melihat lebih rinci pada tingkat rumah tangga diperlukan indikator pangsa pengeluaran pangan.

Diperlukan perlakuan yang berbeda untuk mengantisipasi dampak guncangan ekonomi pada rumah tangga nonpertanian yang membutuhkan waktu relatif cepat dibandingkan rumah tangga pertanian. Untuk lebih mensejahterakan masyarakat maka upaya pembangunan sebaiknya dilakukan lebih merata antarsektor, antarwilayah dan antarkawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B. 1984. The Price of Rice and Inflation In Indonesia 1967-1981. Dissertation. Submitted in Partial Satisfaction of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Economics in the Graduate Division of the University of California,
- BPS. 2008. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2008. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2008. Indikator Ekonomi, Juni 2008. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2008. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2007. Indikator Ekonomi, Mei 2007. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Penduduk Indonesia: Hasil Survei Penduduk Antar Tahun 2005. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2005. Pendapatan Nasional Indonesia 2001-2004. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2004. Pendapatan Nasional Indonesia 2000-2003. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2003. Pendapatan Nasional Indonesia 1999-2002. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2000-2007. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1999-2006. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Bulog. 2008. <http://www.bulog.co.id/datastatistik>
- CSIS. 2002. Tinjauan Perkembangan Ekonomi. 31(1): 36-38; 31(2): 156-158; 31(3): 297-298; 31(4): 414-416. Center for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Deaton, A, and J. Muellbauer. 1980. Economics and Consumer Behavior. Cambridge University Press, London.

- Gunawan, A. H. 1991. Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ilham, N. dan B.M. Sinaga. 2007. Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan sebagai Indikator Komposit Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Agribisnis SOCA*. Vol 7(3): 269-277.
- Ilham, N., K. Suradisastra, T. Pranadji, A. Agustian, E. Lestari, H., dan G.S. Hardono. 2007. Analisis Profil Petani dan Pertanian Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Lipsey, R.G., P.N. Courant, D.D. Purvis, and P.O. Steiner. 1992. *Economics*. Harper Collins College Publisher, New York.
- Pertamina. 2008. <http://pertamina.com/index.php>
- Riasa, P., Antonaria, A. Saepudin, A.A. Risadi, M. Ruslan, dan Wilopo. 2002. Buku Pedoman *Safeguarding*: Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Siregar, H. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan. Bogor, 21 Agustus 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor.
- Varian, H. R. 1992. *Microeconomic Analysis*. Third Edition. W.W. Norton & Company, New York.